

**Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

**The Effectiveness of Motorized Vehicles Fiscal in Its Contribution toward Own-Source
Revenue South Sulawesi Province**

PUTRA PRASETYA

**Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar
Jl. Pendidikan Makassar
Email : Putraprasetya44@gmail.com**

ABSTRAK

Putra Prasetya, 2018. Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makassar. (Pembimbing: **M. Ridwan Tikollah, S.Pd., M.SA. dan Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M.Si.**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor untuk seluruh jenis kendaraan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan sampel penelitian adalah laporan keuangan Pajak Kendaraan Bermotor untuk periode 2013-2017 yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan targetnya di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 sangat efektif karena terdapat kecenderungan lebih dominannya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan melampaui targetnya selama periode pengamatan. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan periode yang sama menunjukkan situasi yang naik-turun walaupun dalam keadaan yang tidak terlalu signifikan yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas 100,79%. Fungsi pajak telah cukup diterapkan di Sulawesi Selatan sehingga Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 berada dalam kategori sedang dengan rata-rata 28,51%.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Putra Prasetya, 2018. The Effectiveness of Motorized Vehicles Fiscal in Its Contribution toward Own-Source Revenue South Sulawesi Province. Thesis. Accounting Education Study Program. Economic Faculty. Universitas Negeri Makassar. (**Supervisors: M. Ridwan Tikollah,S.Pd., M.SA. and Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M.Si.**)

This research aimed at finding the level of effectiveness and tax contribution of motorized vehicles toward Own-Source Revenue South Sulawesi Province. This research used quantitative and descriptive approach. The population was motorized vehicles tax for all types of vehicles contained in South Sulawesi Province. The sample was motorized vehicles tax financial report for a period of five years contained in South Sulawesi Province.

Research result showed realization motorized vehicles tax based on the target in South Sulawesi Province during the period 2013-2017 was very effective because there was a predominant tendency of tax realization of motorized vehicles exceeded its target during the observation period. The level of motorized vehicles fiscal with the same period showed a fluctuating situation even in a less significant condition with an average effectiveness level of 100,70%. Tax functions had been implemented sufficiently in South Sulawesi thus Tax Effectiveness of Motorized Vehicles toward Own-Source Revenue South Sulawesi Province during the period of 2013-2017 was in the medium category with an average of 28,51%.

Keywords: Own-Source Revenue, Tax Effectiveness of Motorized Vehicles, Tax Contribution of Motorized Vehicles

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang terjadi saat ini, banyak ditandai berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang dilakukan di

daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Sehingga, setiap daerah diharapkan mampu mengelola potensi daerahnya sendiri. Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal. Sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber pendapatan daerah terbanyak yaitu pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk di penuhi karena kita tahu bahwa sebagian besar pendapatan negara kita adalah berasal dari pajak, oleh sebab itu permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar

uran pajak atau pun retribusi daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan upaya efektivitas dalam

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri dipungut melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pembayaran Pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) semuanya dilakukan dalam satu atap sehingga

masyarakat mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Adapun penerimaan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2012 sebagai berikut:

Persentase Efektivitas Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pajak Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2009	487.462.237.293	317.859.284.417	65,21	1.242.766.168.254	25
2010	540.986.089.936	367.999.010.533	68,02	1.545.589.709.031	23
2011	653.940.185.103	441.576.829.077	67,53	1.959.708.781.234	22
2012	798.430.598.426	527.241.784.976	66,03	2.198.705.673.862	23

Tabel di atas menjelaskan efektivitas dan kontribusi realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4 tahun terakhir mengalami fluktuatif yaitu pada tahun 2009 tingkat efektivitas PKB mencapai 65,21% dan merupakan kontribusi tertinggi sebesar 25% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 tingkat efektivitas PKB meningkat menjadi 68,02% namun dalam kontribusinya dalam PAD mengalami penurunan menjadi 23% pada tahun 2010. Pada tahun 2011 tingkat efektivitas PKB

mencapai kembali turun menjadi 67,53% dan kontribusi dalam PAD mencapai titik terendah pada empat tahun terakhir yaitu menjadi 22% dan pada tahun 2012 tingkat efektivitas PKB mengalami penurunan menjadi 66,03% namun tingkat kontribusi dalam PAD mengalami peningkatan menjadi 23% dari tahun sebelumnya.

Dapat dilihat dari hasil perhitungan selama empat periode tersebut bahwa dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini belum optimal dan terjadi fluktuatif dari tahun ke tahun.

METODE PENELITIAN

A. Variabel dan Desain Penelitian

1. Variabel Penelitian

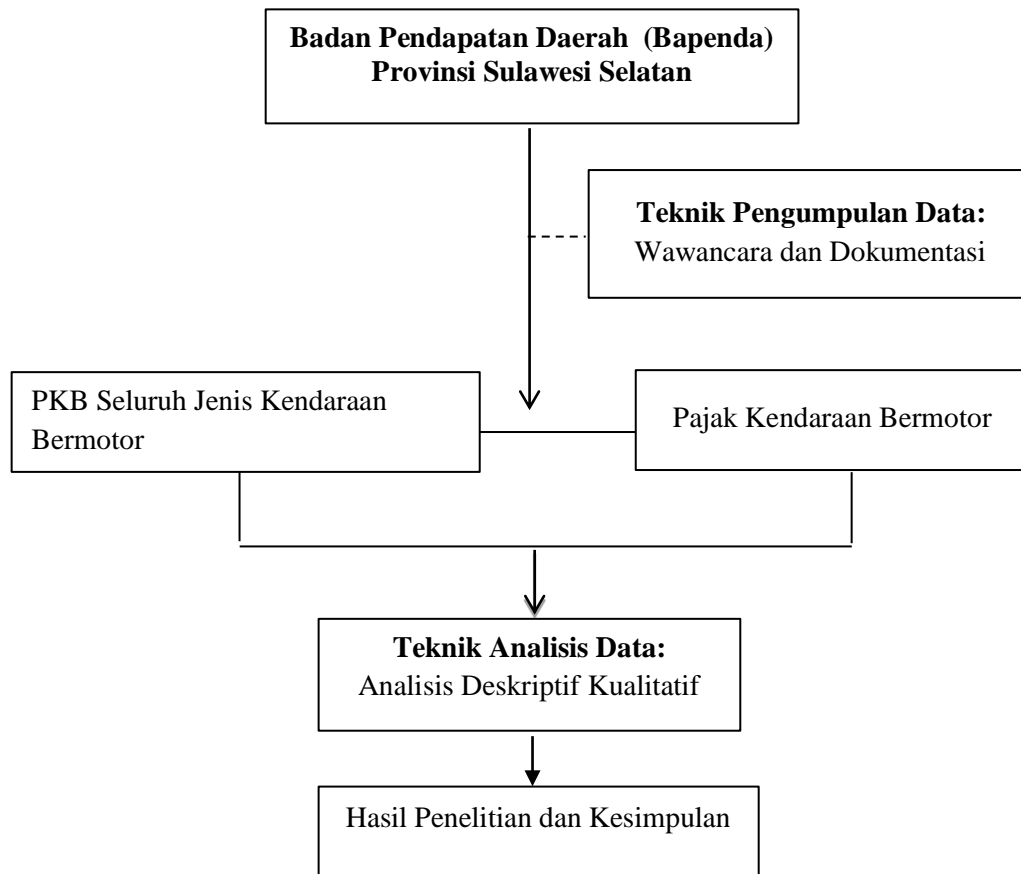
Variabel dalam suatu penelitian merupakan salah satu unsur penting. Oleh karena itu, setiap peneliti harus mengetahui masalahnya yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang diajukan, maka variabel penelitian yang digunakan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami efektivitas pemungutan PKB dalam kontribusinya terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder

yaitu berupa data yang diperoleh dari bahan tertulis melalui dokumen dokumen yaitu profil instansi, struktur organisasi, dan laporan keuangan instansi yang terdapat di BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data primer yaitu data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung ke objek penelitian dalam hal ini melakukan wawancara ke pihak BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor untuk seluruh jenis kendaraan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sampel penelitian ini yaitu laporan keuangan Pajak Kendaraan Bermotor untuk periode lima tahun yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh data digunakan tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dimana analisis ini memaparkan dan mengetahui seberapa efektifnya pemungutan PKB dalam kontribusinya terhadap PAD di

Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih digambarkan dengan skema sebagai jelasnya, maka desain penelitian ini berikut:



B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel digunakan untuk menghindari interpretasi yang lain terhadap variabel yang diteliti”.

1. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2011:83) “Definisi operasional adalah batasan-batasan terhadap lingkup variabel yang merupakan indikator penting sebagai penentu keberhasilan suatu penelitian dan merupakan batasan-batasan yang

Variabel yang diteliti perlu didefinisikan dalam bentuk rumusan yang lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain yang dimaksudkan. Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan

tingkat pencapaian pemungutan pajak kendaraan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- b. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengukuran Variabel

Menurut Sugiyono (2011:84) “Pengukuran variabel adalah skala pengukuran yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur bila digunakan dalam pengukuran akan mendapatkan data kualitatif”. Pengukuran variabel penelitian, sebagai berikut:

- a. Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang digunakan adalah total seluruh jenis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan kepemilikan dan/atau penguasaan di

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinyatakan dalam persen (%).

- b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah total pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat diukur dengan menggunakan satuan persen (%).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Soewadji (2012:129) “Populasi adalah sekelompok orang, atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu”.

Populasi penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor untuk seluruh jenis kendaraan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sampel

Menurut Soewadji (2012:132) “Sampel merupakan sebagian saja dari seluruh jumlah populasi, yang diambil

dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dianggap mewakili seluruh anggota populasi”.

Berdasarkan populasi yang telah ditentukan, maka sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan Pajak Kendaraan Bermotor untuk periode tahun 2013-2017 yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan hal hal sebagai berikut:

1. Wawancara (interview) merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan.
2. Dokumentasi (documentation) merupakan suatu pengumpulan data

dengan menggunakan dokumentasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisa data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh akan dijelaskan dengan kata-kata secara sistematis sehingga penelitian ini dapat terungkap dengan objektif. Rancangan analisis ini dimulai dengan mengumpulkan data dan menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh sehingga diperoleh gambaran yang jelas sebagaimana efektivitasnya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Analisis Efektivitas

Menurut Bastian (2005:78) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan,

maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Jadi untuk menganalisis efektivitas dari pajak atas

kendaraan bermotor maka peneliti menggunakan rumus:

$$Efektifitas\ PKB = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PKB}{Target\ Penerimaan\ PKB} \times 100\%$$

Guna untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator sebagai berikut:

Interpretasi Nilai Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

1. Analisis Kontribusi

Menurut Mahmudi (2010:145) Derajat ini berfungsi untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan rumus sebagai berikut :

$$Kontribusi\ PAD = \frac{Realisasi\ PKB}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

Guna mengukur tingkat kontribusi untuk menggambarkan indikator dalam menilai

pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Interpretasi Nilai Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	CukupBaik
40,10%-50%	Baik
di atas 50%	Sangat Baik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi

Penelitian

1. Sejarah Singkat Bapenda Provinsi

Sulawesi Selatan

Sebelum tahun 1972, Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu bagian dari Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan nama Bagian Penghasilan Daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dengan luasnya daerah kerja yang menyangkut Pendapatan Daerah sehingga perlu memisahkan diri dari Sekretariat Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Bagian Pendapatan daerah pada Biro Keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan Dinas Otonomi yang ditetapkan berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 130/IV/1973, tanggal 17 April 1973 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah untuk menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata, dan bertanggungjawab, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Asli Daerah, perlu dikembangkan pengelolaannya baik pelayanan pada masyarakat, maupun peningkatan Pendapatan Daerah.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setiap saat dilakukan penyempurnaan aturan dan kebijakan. Dengan demikian, maka pelaksanaan tugas-tugas operasional pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah bisa ditangani langsung dengan baik oleh Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan dasar hukum tersebut terbentuklah 15 UPTD di 15 Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Sampai dengan tahun 2017 telah terbentuk 25 UPTD yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang terdiri dari:

1. UPTD Makassar
2. UPTD Palopo
3. UPTD Pare-pare
4. UPTD Maros
5. UPTD Gowa
6. UPTD Pinrang
7. UPTD Bulukumba
8. UPTD Pangkep
9. UPTD Sidrap
10. UPTD Bantaeng
11. UPTD Tana Toraja
12. UPTD Soppeng
13. UPTD Enrekang
14. UPTD Masamba
15. UPTD Selayar
16. UPTD Takalar
17. UPTD Jeneponto
18. UPTD Sinjai
19. UPTD Malili
20. UPTD Barru
21. UPTD Wajo
22. UPTD Luwu
23. UPTD Bone
24. UPTD Toraja Utara

Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamahkan Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang pada akhirnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Visi dan Misi Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari Visi Sulawesi Selatan dan Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yaitu “ Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselarasi Kesejahteraan pada Tahun 2018.” Adapun Visi Badan Pendapatan Daerah adalah “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah yang Maksimal Melalui Sistem yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel, dan Inovatif.”

Untuk mewujudkan visi sebagaimana yang tertera di atas, maka ditetapkan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekitar 13% pertahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% pertahun.
- b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
- c. Mewujudkan aparatur yang cakap, handal, jujur, bertanggungjawab, dan profesional dalam mengelola pendapatan daerah.
- d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dalam rangka untuk mencapai kondisi yang ditetapkan dalam visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dirumuskan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana, sistem dan prosedur, kualitas birokrasi dan tata laksana organisasi; dan
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya laki-laki dan perempuan dalam hal teknis operasional, strategi, manajemen, dan mental spiritual.

3. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

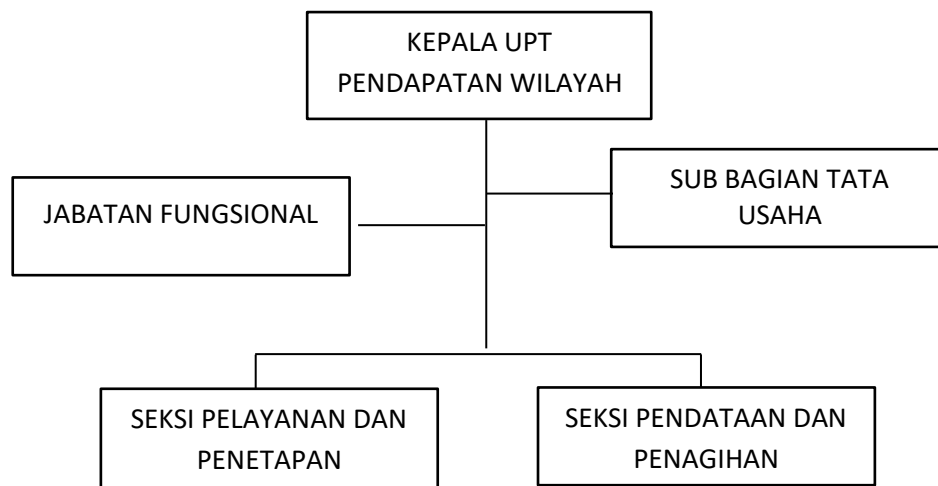
Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dan hubungan antara bagian dengan komponen yang terdapat dalam suatu instansi. Dengan adanya struktur maka pembagian kerja dapat dispesifikasikan.

Selain itu, struktur juga dapat menunjukkan fungsi dan kegiatan yang berbeda antara satu dengan bagian lainnya.

Susunan organisasi UPTD Bapenda Sulawesi Selatan adalah:

- a. Kepala UPTD Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Kasubag Tata Usaha
- c. Kasi Pendapatan Dan Penetapan
- d. Kasi Penagihan dan Penetapan

Untuk lebih jelasnya, berikut peneliti menyajikan gambar struktur organisasi Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:



Uraian tugas dalam organisasi UPTD Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTD

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam bidang menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas. Dalam menjalankan tugas pokoknya, kepala UPTD mempunyai 6 fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) pengordinasian pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- 3) Pengelolaan pendapatan.
- 4) Pengordinasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data.
- 5) Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang usahanya.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan

pengendalian, monitoring, dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD pada Badan Pendapatan Daerah serta penyusunan laporan. Kepala Sub Bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kegiatan tata usaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 2) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- 3) Melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga.
- 4) Melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD.
- 5) Melaksanakan penatausahaan keuangan.
- 6) Melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran.

c. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan

Melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pendataan dan

penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, kepala seksi pendataan dan penetapan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi.
- 2) Menyelenggarakan inventarisasi data potensi obyek dan subyek pajak daerah, penetapan dan penginventarisasian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
- 3) Membuat laporan hasil pendataan dan penetapan setiap bulannya.

d. Seksi Penagihan dan Penerimaan

Melaksanakan sebagian tugas UPTD didalam bidang penagihan dan penerimaan. Apapun yang dimaksud dalam tugas pokok seksi penagihan dan penerimaan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penagihan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

- 2) Menyiapkan surat penagihan dan surat tegur terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
- 3) Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan penerimaan setiap bulannya.
- 4) Melaksanakan tugas operasional pemeriksaan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bebalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di jalan raya bekerja sama dengan instansi terkait.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai suatu organisasi merupakan suatu kesatuan kerja yang dikordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan relatif jelas, yang berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan. Organisasi merupakan suatu kumpulan orang yang dikelompokkan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokan orang-orang tersebut didasarkan kepada prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi,

hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggung jawab, dan otoritas tertentu. Wujud pengelompokan tersebut dapat diamati dari struktur dan hirarki, karena itu menyusun suatu struktur sering didefinisikan dengan membuat desain organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Sarana dan Prasarana

a. Sarana

Sarana kegiatan yang dimiliki oleh UPTD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penunjang proses pelayanan prima kepada wajib pajak termasuk perbaikan, pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas ditunjang dengan tersedianya gedung yang telah dilengkapi dengan ruang tunggu wajib pajak, loket/ruang pelayanan, ruang pertemuan, loket/ruang informasi, ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan wajib pajak, ruang pengendali komputer, ruang kordinator dan pejabat unit SAMSAT, area cek fisik kendaraan bermotor, dan halaman parkir

yang luas baik di depan maupun di bagian samping dan belakang UPTD Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Prasarana

Dalam rangka meningkatkan pelayanan wajib pajak, aspek kecukupan dan kewajaran penyedia prasarana dan dasarnya telah sangat memenuhi standar. Untuk menjamin penyelenggaraan proses pelayanan kepada wajib pajak. Ruangan ini cukup memadai dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak baik yang akan melakukan pembayaran PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ dengan tersedianya fasilitas yang dilengkapi AC, tempat duduk, pesawat TV, dan WC yang terjaga kebersihannya.

Ruang tamu wajib pajak ini dilengkapi dengan layar monitor yang digunakan untuk menampilkan nomor urut, nomor kasir antrian, status proses pendaftaran serta dilengkapi sistem suara sebagai pemanggil nomor urut antrian.

UPTD Provinsi Sulawesi Selatan menyediakan papan informasi yang

berisikan denah kantor, mekanisme dan prosedur pengurusan, nama pejabat unit UPTD Provinsi Sulawesi Selatan. Besarnya biaya pengurusan dan informasi lainnya. Adapun tersedianya pusat informasi yang dapat memberikan informasi pada wajib pajak mengenai kendaraan-kendaraan yang diblokir, besarnya PKB/BBNKB, kendaraan blokir ranmor, dan kendaraan-kendaraan hilang.

5. Program dan Kegiatan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelum dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengelolaan pemungutan pajak daerah UPTD se-Sulawesi selatan.

- b. Administrasi pengelolaan pendapatan daerah.
- c. Pengadaan barang dan jasa kebutuhan kantor Bapenda Sulawesi Selatan.
- d. Pengelolaan administrasi pajak daerah.
- e. Inventarisasi barang dan jasa Badan Pendapatan Daerah.

Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD, yang dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan berikut:

- a. peningkatan SDM aparatur laki-laki/perempuan pada pengawasan dan pendapatan daerah lainnya.
- b. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan/materil bagi aparatur laki-laki/perempuan.
- c. Pengadaan barang dan jasa kebutuhan kantor Bapenda Sulawesi Selatan.
- d. Peningkatan kapasitas SDM operator dan operator data.
- e. Peningkatan SDM aparatur laki-laki/perempuan pengelolaan pendapatan daerah.

Peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembentukan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Koordinasi penyusunan LKPJ, nota perhitungan, dan evaluasi kinerja bidang pendapatan.
- c. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi program kegiatan.

Program peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah, yang dijabarkan menjadi 24 (dua puluh empat) kegiatan berikut:

- a. Pendataan, penagihan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD se-Sulawesi Selatan.
- b. Penerbitan Pajak Kendaraan Bermotor UPTD se-Sulawesi Selatan.
- c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

- d. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional.
- e. Koordinasi pelaksanaan penertiban dan pendataan subyek/obyek Pajak Daerah.
- f. Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah.
- g. Verifikasi dan analisa data piutang.
- h. Asistensi penyusunan target pokok dan target perubahan 2014 di bidang pendapatan.
- i. Penyusunan peraturan pelaksanaan/teknis di bidang pendapatan.
- j. Asistensi dan evaluasi alokasi dana bagi hasil apajak rokok.
- k. Koordinasi, pendataan, penagihan, dan optimalisasi penerimaan pajak rokok.
- l. Pemantauan HPU (Harga Produksi Unit) Kendaraan Bermotor serta penyusunan dan sosialisasi tabel NJKB.
- m. Optimalisasi dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah dan Dana bagi Hasil Pajak Daerah.

- n. Rekonsiliasi data unit Kendaraan Bermotor.
- o. Monitoring dan evaluasi data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
- p. Monitoring dan evaluasi data pelaksana Layanan Unggulan Samsat.
- q. Pemutakhiran database objek dan subjek Pajak Daerah.
- r. Penyusunan laporan, rekonsiliasi, dan pertanggungjawaban keuangan.
- s. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya dan pemantauan serta pendataan objek Pendapatan Daerah lainnya.
- t. Rekonsiliasi penerimaan bagi hasil.
- u. Pembinaan dan monitoring pengelolaan dan retribusi daerah dan benda-benda berharga (barang kuasi).
- v. Evaluasi penerimaan Retribusi Daerah dan pengelolaan Barang-barang berharga.
- w. Pengelolaan dokumentasi administrasi pemungutan Retribusi Daerah.
- x. Pengelolaan dokumentasi administrasi pemungutan Retribusi Daerah.

y. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

Program peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan Pajak Daerah, yang dijabarkan menjadi 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Samsat Keliling se-Sulawesi Selatan.
- b. koordinasi pembinaan dan pengembangan Samsat Provinsi Sulawesi Selatan pengelolaan *Website* Bapenda Sulawesi Selatan.

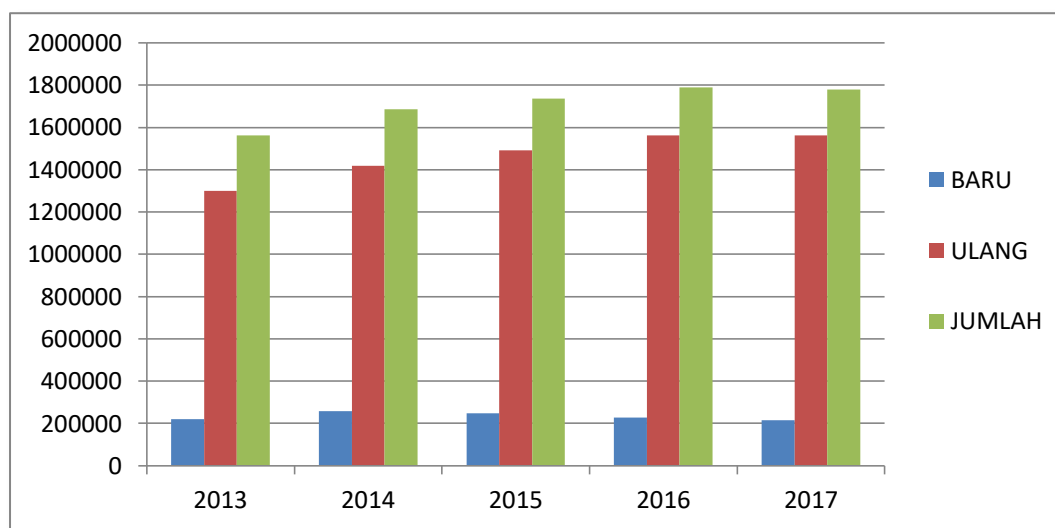
B. Penyajian Data

Ada berbagai jenis komponen pajak daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan namun dalam penelitian ini difokuskan pada Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak

digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian adalah Pajak Kendaraan Bermotor dengan periode

pengamatan tahun 2013-2017. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan disajikan data jumlah Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.



Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Berikut tabel perbandingan data kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sampai dengan 2017 :

Tabel 5. Data Perbandingan Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Kendaraan			Pertumbuhan	
	Baru	Ulang	Jumlah	Unit	%
2013	261.207	1.300.581	1.561.788	-	-
2014	265.764	1.419.594	1.685.358	123.570	8%
2015	246.642	1.490.421	1.737.063	51.705	3%
2016	227.783	1.561.062	1.788.845	51.782	2,9%
2017	216.268	1.563.112	1.779.380	-9.465	-1%
Rata-rata Pertumbuhan per tahun				217.592	13%

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, yakni selama 5 tahun, rata-rata pertumbuhan data kendaraan sebesar 217.592 unit atau sebesar 13 %. Pertumbuhan data kendaraan selama 4 (empat) tahun yaitu 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan.

Pada tahun 2014 jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 8% atau 123.570 unit, yaitu dari 1.561.788 unit pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.685.358 unit tahun 2014, jumlah tersebut menjadi pertumbuhan paling tinggi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2015 pertumbuhannya hanya sebesar 3%, atau sebesar 51.705 unit, yaitu dari 1.685.358 unit tahun 2014 meningkat menjadi 1.737.063 unit pada tahun 2015. Jumlah tersebut lebih kecil apabila di bandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan sebesar 2,9% atau 51.782 unit, yaitu dari 1.737.063 unit pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.788.845 unit tahun 2016. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1%, atau sebesar -9.465 unit, yaitu dari 1.788.845 unit tahun 2016 menurun menjadi 1.779.380 unit pada tahun 2017. Menurut Albar (2017) “Sejak diberlakukannya Perubahan PP 50 Tahun 2010 ke PP 60 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berimbas terhadap pemasukan Pajak Kendaraan Bermotor. Secara umum meskipun pajak dirasakan meningkat, namun dari sisi lain kesadaran wajib pajak samsat kendaraannya menurun”. Berikut adalah tabel data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor periode 2013-2017:

Tabel 6. Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2013–2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)
2013	722.728.730.273
2014	813.245.129.812
2015	907.589.844.229
2016	1.026.994.107.478
2017	1.103.139.264.509
Total	4.573.697.076.301

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Berdasarkan penyajian Tabel 6, realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor periode 2013-2017 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 722.728.730.273, hingga tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp 1.103.139.264.509, secara umum terjadi peningkatan realisasi penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun, hal ini tentu juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tabel di bawah ini juga menunjukkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode 2013-2017.

Tabel 7. Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2013–2017

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2013	2.560.045.632.551
2014	3.029.122.238.495
2015	3.270.828.511.466
2016	3.449.561.308.104
2017	3.678.689.784.273
Total	15.989.147.474.889

Sumber : Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Pada tabel 7, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2017 di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami

peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2013 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 2.560.045.632 hingga pada

tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp 3.678.689.784.273.

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap target perubahan Pajak Kendaraan Bermotor.

C. Analisis Data

1. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Efektifitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan, dalam hal ini peneliti mengukur hubungan antara hasil

Tabel 9. Data Tingkat Efektivitas Realisasi dan Target Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Target Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2013	722.728.730.273	714.433,892,000	101,16	Sangat Efektif
2014	813.245.129.812	808.194,220,000	100.62	Sangat Efektif
2015	907.589.844.229	904.284,250,000	100,37	Sangat Efektif
2016	1.026.994.107.478	1.006.097.880.000	102,08	Sangat Efektif
2017	1.103.139.264.509	1.106.098.000.000	99,73	Efektif
Rata-rata			100,79	Sangat Efektif

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor bersifat fluktuatif walaupun dalam keadaan tidak terlalu signifikan. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2013 adalah sebesar 101,16%, hal tersebut

menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2013 adalah sangat efektif. Tahun 2014 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan menjadi 100,62%, namun hal tersebut tetap menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan pada tahun

2014 adalah Sangat efektif. Tahun 2015 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan menjadi 100.37%, namun penurunannya terbilang sedikit yaitu sebesar 0,25%, tetapi penurunan tersebut tidak menunjukkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2015 menjadi tidak efektif. Tahun 2016 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 102,08%, hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 adalah Sangat efektif. Tahun 2017 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan drastis dari 4 tahun terakhir dikarenakan tahun 2017 tidak mencapai target Pajak Kendaraan Bermotor yang diinginkan yaitu menjadi 99,73%, hal tersebut menunjukkan pada tahun 2017 Pajak Kendaran Bermotor adalah efektif.

Analisis efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor mengalami keberhasilan

tertinggi pada tahun 2016 dengan persentase keberhasilan sebesar 102,08% dengan kategori kriteria sangat efektif. Sedangkan pencapaian minimum didapatkan pada tahun 2017 yaitu hanya sebesar 99,73%, dengan kategori kriteria efektif.

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari potensi wilayah daerah dan dipungut berdasarkan ketentuan peraturan daerah dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. Adapun rumus yang digunakan untuk melihat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Data Tingkat Kontribusi Realisasi PKB dan Realisasi PAD di Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2013	722.728.730.273	2.560.045.632.511	28,23	Sedang
2014	813.245,129.812	3.029.122.238.495	26,84	Sedang
2015	907.589.844.229	3.270.828.511.466	27,74	Sedang
2016	1.026.994.107.478	3.449.561.308.104	29,77	Sedang
2017	1.103.139.264.509	3.678.689.784.273	29,98	Sedang
Rata-rata			28,51	Sedang

Sumber: Hasil Olahan Data

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah disajikan dalam bentuk tabel 11 data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan hasil dengan tingkat persentasi sedang. Pada tahun 2013 persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 28,91%. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 mengalami penurunan terendah menjadi 26,85% hal ini menjadikan pada tahun 2012 menjadi titik terendah dalam

kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2015 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 27,75%. Kemudian pada tahun 2016 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan drastis menjadi 29,77%. Dan pada tahun 2017 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami peningkatan dan menjadikan tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah tertinggi selama periode 2013-

2017 yaitu sebesar 29,98%. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2013-2017 dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi Sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

A. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan targetnya di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 tergolong sangat efektif yaitu mencapai 100,79% karena terdapat kecenderungan lebih dominannya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan melampaui targetnya selama periode pengamatan. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga menunjukkan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kisaran 28,51% yang berada dalam kategori sedang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Widhiatuti (2016) bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar tergolong sangat efektif yang dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 102%.

Begitupun hasil dari penelitian yang dikemukakan oleh Anwar (2014) bahwa Jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2009-2013 adalah sekitar 16,095 unit mobil pertahun dan sekitar 81,912 unit sepeda motor pertahun. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2012 tergolong sedang berkisar antara sekitar 25.7% sampai 29.6% atau rata-rata sekitar 27.7%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan targetnya di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 tergolong sangat efektif karena terdapat kecenderungan lebih dominannya realisasi PKB Provinsi Sulawesi Selatan melampaui targetnya selama periode pengamatan.
2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 berada dalam kategori sedang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti mencoba memberikan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak maka Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan dan UPT wilayah sebaiknya terjun langsung ke guna memberikan pemahaman tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah maupun provinsi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengkaji lebih dalam mengenai potensi yang ada kemudian membandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang sebenarnya terjadi dilapangan serta melakukan pengambilan sampel yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, indra.2005. Akuntansi Sektor Publik, Jakarta.Erlangga

Mahmudi.2010.Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi 2, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi terbaru 2016. Andi. Yogyakarta

Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono. 2011. Metode penelitian, kualitatif,kuantitatif, dan R&B. Bandung: Afabeta

Soewadji, Jusuf. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian: Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sumber Lain:

Aha.2011. Pendapatan Asli Daerah (PAD):Pengertian, Sumber, dan Fungsi.(<http://www.ilmudasar.com/2017/08/Pendapatan-Asli-Daerah-PAD-adalah.html>)

Anwar, Kaheril J, 2014. Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.

Damang.2011.PendapatanAsli Daerah. (<http://www.negarahukum.com/hu>

kum/pendapatan-asli-daerah.html.)

Farrasita.2012. Efektivitas Organisasi. (<http://peppyku.co.id/2012/05/efektivitas-organisasi.html>.)

Albar,Muh.Asis.2017.Wajib Pajak Keluhkan Kenaikan Tarif Pada PP 60 Tahun 2016. (<http://makassar.tribunnews.com>).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Jakarta: Departemendalam negeri.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah. 2004. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 2000. Jakarta: Departemen Keuangan.

Widhiatutu, Desak. 2016. Evektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar. Skripsi UNHAS.